



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	17.SOP/OT.03/DLT.1/2024
TGL. PEMBUATAN	9 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Monamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelaksanaan PNBK Ketenagalistrikan dari Denda TKDN Subsektor Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 201 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian ESDM
12. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 682 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM-04.02 DJK-03.02 Pelaksanaan PNBK Ketenagalistrikan dari Denda TKDN Subsektor Ketenagalistrikan
2. SOP Pengawasan Skema Penilaian Kesesuaian Sertifikasi Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan
3. SOP Pengawasan Sistem Instalasi Tenaga Listrik dan Jenis Produk yang Dikecualikan dari Kewajiban Pemenuhan SNI
4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar Pada Aplikasi Nadine
5. SOP Pelaksanaan PNBK Ketenagalistrikan yang Berasal dari Denda Administratif Subsektor Ketenagalistrikan

Peringatan :

1. Apabila tidak dilakukan penerapan sanksi denda administratif pemenuhan TKDN, maka akan mempengaruhi penegakan hukum regulasi keselamatan ketenagalistrikan dan tidak tercapainya kemandirian teknologi serta pemberdayaan industri dalam negeri

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik
2. Memahami peraturan Perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif











Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja
2. Jaringan Internet
3. Komputer/Printer/Scanner

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan disimpan dalam arsip
2. Laporan hasil rapat panel verifikasi nilai TKDN dalam arsip

Judul SOP: Pelaksanaan PNPB Ketenagalistrikan dari Denda TKDN Subsektor Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan	
		Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Lembaga Verifikasi TKDN	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan)	Tim P3DN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Pokja Keuangan)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, melaksanakan kewajiban verifikasi TKDN dan menyampaikan kepada Lembaga Verifikasi TKDN untuk ditetapkan nilai TKDN pekerjaan						Dokumen untuk penilaian TKDN Pekerjaan	-	Surat permohonan penetapan nilai TKDN pekerjaan	
2	Lembaga Verifikasi TKDN memeriksa dan menetapkan nilai TKDN pekerjaan dan menyampaikan kembali kepada Pelaku Usaha						Dokumen untuk penilaian TKDN Pekerjaan	-	Nilai TKDN Pekerjaan	
3	Pelaku Usaha melaporkan nilai TKDN Pekerjaan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan						Nilai TKDN Pekerjaan	-	Nilai TKDN Pekerjaan	
4	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan verifikasi TKDN, dan meminta pelaporan progres pekerjaan penilaian TKDN kepada Pelaku Usaha						SK Tim Pembinaan dan Pengawasan	4 hari kerja	Laporan Pengawasan Pekerjaan Verifikasi TKDN dan Surat Permintaan Pelaporan Pekerjaan Verifikasi TKDN	1. SOP Pengawasan Skema Penilaian Kesesuaian Sertifikasi Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan 2. 'SOP Pengawasan Sistem Instalasi Tenaga Listrik dan Jenis Produk yang Dikecualikan dari Kewajiban Pemenuhan SNI
5	Pelaku Usaha melaporkan progres pekerjaan penilaian TKDN kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan						Surat Permintaan Pelaporan Pekerjaan Verifikasi TKDN	7 hari kerja	Laporan pekerjaan penilaian TKDN	
6	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melakukan Rapat Panel hasil verifikasi nilai TKDN dengan Pelaku Usaha, Lembaga Verifikasi TKDN dan Tim P3DN Ditjen Ketenagalistrikan dan hasilnya disampaikan kepada Tim P3DN untuk ditetapkan hasil rapat panel verifikasi nilai P3DN						Bahan Rapat	1 hari kerja	Notulen Rapat Panel Hasil Verifikasi Nilai TKDN	
7	Tim P3DN menetapkan hasil rapat panel verifikasi nilai TKDN						Notulen Rapat Panel Hasil Verifikasi Nilai TKDN	7 hari kerja	1. Penetapan Hasil Rapat Panel Verifikasi Nilai TKDN 2. Nota Dinas Permohonan Pemrosesan Pembayaran PNPB yang bersumber dari Denda Administratif Ketenagalistrikan	- Apabila sesuai dengan hasil penilaian dari Lembaga Verifikasi Independen dimana nilai awal TKDN pekerjaan sama dengan nilai TKDN akhir pekerjaan maka proses selesai; - Apabila tidak sesuai nilai TKDN akhir pekerjaan lebih rendah dari nilai TKDN awal pekerjaan, menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menerbitkan surat pengenaan sanksi denda TKDN
8	Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menerima salinan hasil rapat panel hasil verifikasi nilai TKDN yang menyatakan bahwa badan usaha telah memenuhi ketentuan P3DN dan tidak perlu membayar denda						Penetapan Hasil Rapat Panel Verifikasi Nilai TKDN	1 hari kerja	Penetapan Hasil Rapat Panel Verifikasi Nilai TKDN	
9	Setihtjen Ketenagalistrikan memproses pengenaan denda TKDN Subsektor Ketenagalistrikan						Nota Dinas Permohonan Pemrosesan Pembayaran PNPB yang bersumber dari Denda Administratif Ketenagalistrikan	-	Pemrosesan Pembayaran PNPB yang bersumber dari Denda Administratif Ketenagalistrikan	Proses pengenaan denda administratif subsektor ketenagalistrikan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam SOP Pelaksanaan PNPB Ketenagalistrikan yang Berasal dari Denda Administratif Subsektor Ketenagalistrikan